

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA TASIKMALAYA (Studi Kasus pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede)

Arifah Rosmajudi

E-mail: arifahrosstia@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

ABSTRAK

Dalam rangka penataan dan pengembangan pariwisata, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah membuat kebijakan melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2006 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam di obyek dan daya tarik wisata Situ Gede, hal ini dilakukan agar dalam penataan dan pengembangan pariwisata agar dapat berjalan secara tepat, efektif dan efisien. Jumlah obyek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya belum terlalu banyak, terutama yang dikelola oleh Pemerintah. Salah satu obyek wisata yang menjadi unggulan Kota Tasikmalaya adalah obyek wisata Situ Gede, yang diharapkan dapat menjadi obyek wisata unggulan yang ada di Kota Tasikmalaya. Dalam melakukan penataan dan pengembangan obyek wisata situ gede terdapat beberapa masalah diantaranya adalah status lahan dimana lahan situ gede adalah milik Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Barat, serta kurangnya dana untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada sehingga banyak sarana dan prasarana yang ada di obyek wisata Situ Gede telah rusak. Metode analisis deskripsi digunakan untuk memotret kondisi di lapangan dan menemukan fakta dengan interpretasi dan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan penelitian. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha menemukan masalah dan menyajikan secara langsung apa adanya hakikat hubungan antara penulis dan sumber informasi atau informan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pariwisata, Situ Gede

ABSTRACT

In order to structure and development of tourism, the City of Tasikmalaya has made a policy through regulation Mayor Tasikmalaya No, 9 of 2006 concerning the Utilization of Natural Resources in the object and tourist attraction Situ Gede, it is done so in the structuring and development of tourism in order to run properly, effective and efficient. The number of tourist attractions in the city of Tasikmalaya is not too many, especially those managed by the Government. One of the attractions is a leading Tasikmalaya City is a tourist attraction Situ Gede, which is expected to become a leading tourist attraction in the city of Tasikmalaya. In conducting the settlement and tourism development there is big, there are several issues including the status of the land where big is the property of the Central Management of Water Resources of West Java Province, as well as the lack of funds for the maintenance of facilities and infrastructure that exist in the object Situ Gede has been damaged. Description of the analytical methods used to shoot conditions in the field and find the facts to the interpretation and accurately describe the nature of some phenomenon of groups or individuals from the results of the study findings. With a qualitative approach, the researchers tried to find the problem and present firsthand the nature of the relationship between the author and the source of information or informant.

Keywords: Policy Implementation, Tourism, Situ Gede

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dalam pengembangan perekonomian lokal, regional maupun nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek ekonomi sektor pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, serta turut mendorong pembangunan di daerah.

Kota Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang mempunyai obyek wisata yang potensial yang berpotensi menjadi motor penggerak perekonomian daerah. Pariwisata saat ini menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, untuk itu diperlukan adanya penataan dan pengembangan pariwisata sehingga dengan adanya penataan dan pengembangan pariwisata maka akan merangsang para wisatawan untuk datang dan berkunjung ke obyek-obyek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya. Ini tentu akan memberikan pengaruh positif terhadap tatanan ekonomi yang ada disekitar kawasan obyek wisata tersebut, selain itu juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

Jumlah obyek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya belum terlalu banyak, terutama yang dikelola oleh Pemerintah. Salah satu obyek wisata yang menjadi unggulan Kota Tasikmalaya adalah obyek wisata Situ Gede, yang diharapkan dapat menjadi obyek wisata unggulan yang ada di Kota Tasikmalaya. Untuk dapat menjadi obyek wisata unggulan, obyek wisata situ gede telah beberapa kali mengalami penataan dan pengembangan baik dari sarana maupun prasarana.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun masyarakat sekitar dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Penanggulangan tersebut diantaranya adalah dengan melakukan pengerukan, reboisasi di sekitar Situ Gede,

pengembangan minat wisata, pembuatan sarana rekreasi/olahraga dan sarana-sarana lain, namun hasilnya belum memuaskan dibandingkan potensi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan. Bahkan tidak jarang terjadi konflik kepentingan dan persepsi yang berbeda dalam menangani kawasan tersebut yang berakibat pada kurang efektifnya penanganan yang dilakukan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 9 tahun 2006 tentang Pemanfaatan Sumber Daya Alam di obyek dan daya tarik wisata Situ Gede, yang dapat memayungi seluruh kepentingan beserta program-program dan kegiatan-kegiatan dalam penataan dan pengembangan wisata Situ Gede. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan, pariwisata serta kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan beberapa permasalahan yang menyangkut:

1. kurangnya sumber daya baik sumber daya manusia pendukung yang potensial, maupun kurangnya alokasi dana dari pemerintah daerah untuk operasionalisasi dan pengembangan kepariwisataan.
2. belum adanya kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak/dinas terkait untuk menyusun suatu rencana kegiatan yang kompeten.
3. begitu pula komunikasi dan kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat sekitar belum terjalin dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka pertanyaan penelitian (*research questions*) adalah: Bagaimana implementasi kebijakan penataan dan

pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya. (Studi kasus pada Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Obyek dan Daya Tarik Wisata Situ Gede)

LANDASAR TEORI

Secara konseptual, *Grindle* dalam Mustopadidjaja (2003) mengatakan bahwa: “Implementasi adalah *ageneral process of administrative action that can investigate at specific program level*” (Mustopadidjaja, 2003). Sedangkan Pressman dan Wildavsky dalam Mustopadidjaja (2003) mengatkan bahwa “*May be viewed as process of interaction between the setting of goal and action geared to achieving them*” (Mustopadidjaja, 2003). Pandangan ini, mengindikasikan bahwa implementasi dapat dikatakan sebagai *general process* yang dilaksanakan atau diterapkan semata untuk mencapai suatu tujuan.

Edward III dan Sharkansky mengartikan kebijakan Negara yang hampir mirip dengan definisi Dye pada buku *Islamy*: “...is what government say and do, or do not do. Its is the goals or purposes of gocernment programs...” (Islamy, 2002). Pengertian tersebut mengandung arti apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah, kebijakan Negara itu berupa sasaran atau tujuan program pemerintah. Kemudian menekankan bahwa kebijakan Negara itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundangan atau bentuk pidato pejabat teras pemerintah maupun program dan tindakan yang dilakukan pemerintah.

Implementasi kebijakan menurut *Smith* dalam *Islamy* (2002) adalah: “Model proses atau alur adalah proses kebijakan yang dibuat pemerintah dari perspektif perubahan sosial dan politik, guna mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran” (Islamy, 2002), *Smith* dalam *Islamy* (2002) mengatakan bahwa “Ada empat variabel yang perlu diperhatikan di dalam proses implementasi kebijakan: 1. *Idealized policy*, 2. *Target group*, 3.

Implementing organization, 4. *Environmental factors*.

Van Meter dan *Van Horn*, dalam Wahab (2021) mengatakan bahwa: “Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang berlangsung di dalam hubungan berbagai faktor” (Wahab, 2021). Kebijakan menegaskan standar sasaran yang mesti dicapai para pelaksana kebijakan. Setiap penilaian kebijakan diperlukan kriteria yang dirumuskan secara spesifik dan konkrit. Setiap kebijakan menuntut tersedianya sumber daya yang memadai, baik berupa dana maupun insentif lainnya.

Pendapat tersebut mengasumsikan, jika implementasi kebijakan dirasa efektif, maka birokrasi pelaksana hendaknya mematuhi peraturan atau petunjuk pelaksana atau teknis, sehingga tujuan sasaran program harus jelas dan konsisten sebagai standar evaluasi dan sarana legal bagi birokrat pelaksana dalam upaya menggerakkan sumber daya.

Impelementasi kebijakan dari *Jones* dalam Wahab mengatakan bahwa: “*Tree sub activities of implementation; organization, interpretation, and application*” (Wahab, 2021). Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa implementasi dalam kenyataannya, lebih diprioritaskan kepada suatu ranah strategis di dalam upaya pencapaian tujuan dari suatu kebijakan.

Pada implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka pelaksana (*implementers*) tidak hanya mengetahui segala yang dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan. Kebanyakan para pelaksana bisa melaksanakan implementasi kebijakan dengan leluasa bila ada aturan yang dirasa transparan dan disepakati dari atasan ke bawahan. Mengingat ketergantungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan sangat kuat terhadap superioritas perumus kebijakan. Realitas ini mencerminkan berupa kompleksnya kebijakan itu sendiri. Cara pelaksana melakukan keelaluasaanya itu

sebagian besar tergantung kepada kecenderungan (*disposition*) terhadap suatu kebijakan dari struktur birokrasi.

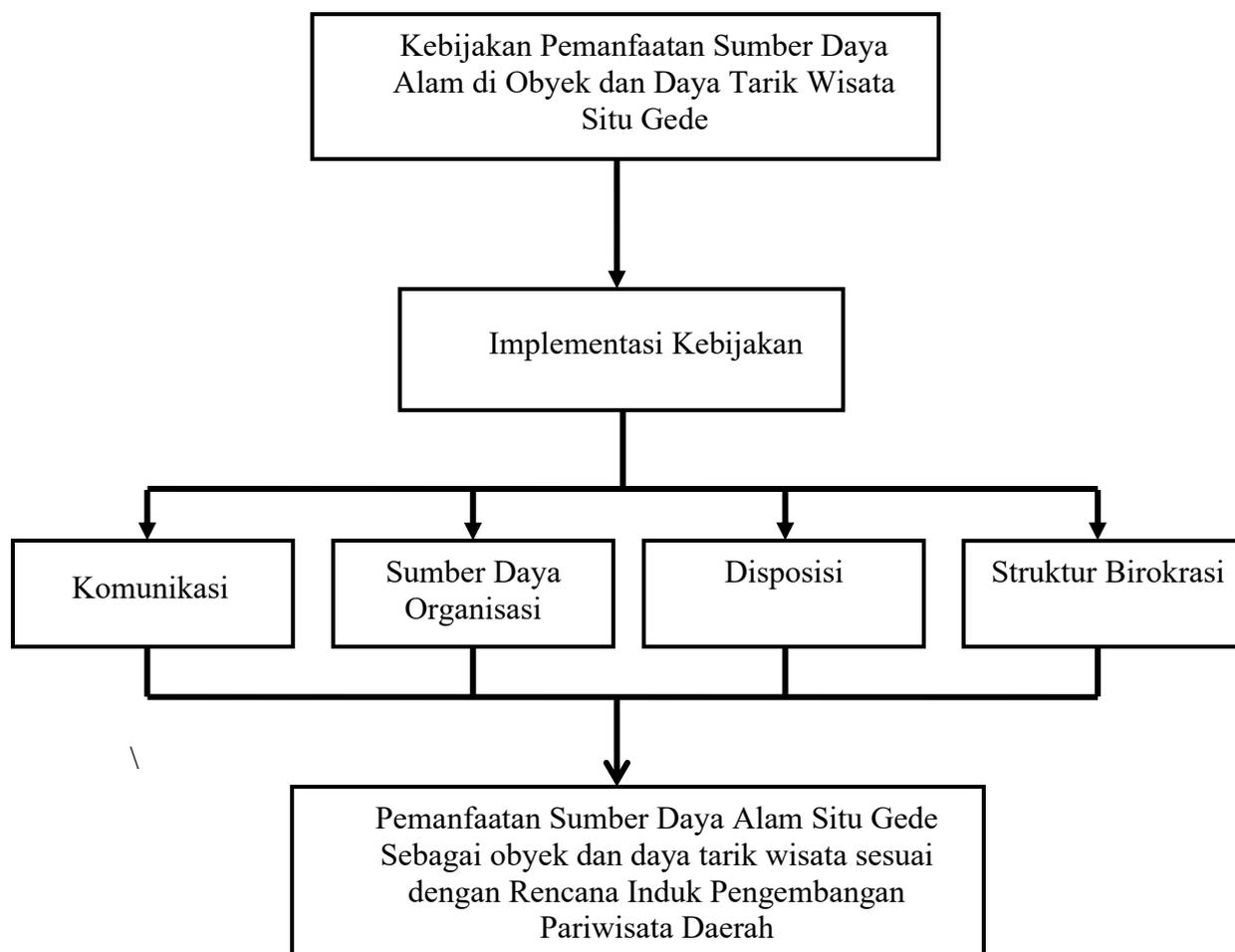
Sejalan dengan pendapat tersebut, Edward III dalam Islamy (2002) telah merumuskan ada empat faktor krusial untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut (Islamy, 2002):

1. Komunikasi; penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi;
2. Sumber daya; *staff* (jumlah dan mutu, informasi untuk pengambilan keputusan, *authority* dari fasilitas);
3. Disposisi atau sikap pelaksana; berupa keinginan atau kesepakatan di antara aktor;
4. Struktur birokrasi organisasi.

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin

lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Bagaimana implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Begitu menentukan dan strategisnya fungsi dan peranan implementasi maka Nugroho (2004) memberikan porsi 60% (persen) untuk implementasi sebagai penentu keberhasilan, dan sisanya 20% untuk rencana dan 20% lagi adalah bagaimana kemampuan mengendalikan implementasi itu sendiri (Riant, 2004).



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian

METODE PENELITIAN

Metode analisis deskripsi digunakan untuk memotret kondisi di lapangan dan menemukan fakta dengan interpretasi dan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan penelitian. Pendekatan kualitatif dicirikan tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala tersebut tidak memungkinkan di ukur secara tepat (Garna, 2000).

Data dan informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pelaksana seperti: Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Seksi Bina Usaha Sarana Wisata, Staf Pelaksana, Pelaku Usaha di kawasan obyek wisata dan masyarakat umum. Wawancara di arahkan pada persoalan-persoalan yang erat kaitannya dengan persepsi mereka terhadap pelaksanaan pemanfaatan obyek situ gede sebagai obyek wisata.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi pariwisata di Kota Tasikmalaya harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan program pengembangan pariwisata yang diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan wilayah serta menyebarnya tempat pariwisata yang dapat dikunjungi wisatawan.

Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan pembangunan bidang kepariwisataan di Kota Tasikmalaya selama ini menghadapi masalah pokok yaitu : keterbatasan Sumber Daya Manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas(kompeten dan profesional), belum baiknya infrastruktur (sarana dan prasarana), khususnya penataan fisik obyek wisata, koordinasi lintas instansi dan lintas pelaku yang belum optimal.

Agar bidang kepariwisataan di Kota Tasikmalaya dapat berkembang dengan

baik, maka implementasi kebijakan kedepan harus fokus pada upaya perbaikan yaitu peningkatan kapasitas SDM (kuantitas dan kualitas), ketersediaan dan perbaikan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas dari dan menuju destinasi wisata, serta perumusan mekanisme koordinasi lintas instansi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di tempat penelitian

Komunikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Objek Wisata Situ Gede. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Tasikmalaya mensosialisasikan tentang Implementasi kebijakan dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pengembangan Objek wisata khususnya Objek wisata Situ Gede kepada masyarakat dan pengunjung objek wisata Situ Gede, sebagai instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengembangan wilayah-wilayah yang mempunyai nilai wisata, kegiatan promosi tentunya salah satu langkah dari bagian pengembangan suatu daerah. Dalam hal pengembangan objek wisata Situ Gede, transmisi komunikasi disalurkan melalui proses penyaluran informasi dari Kepala Dinas Pariwisata kepada Kepala Bidang melalui rapat koordinasi antar bidang. Sosialisasi dalam pengembangan objek wisata Situ Gede kepada masyarakat dilakukan di setiap kegiatan kemasayarakatan, kegiatan ini baru dilakukan satu kali pada tahun tersebut, dan sosialisasi secara tidak langsung seperti pemanfaatan pamflet, baliho dan sebagainya, sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal.

Sosialisasi promosi wisata dalam rangka pengembangan objek wisata Situ Gede sangat berpengaruh kepada kemampuan Dinas Pariwisata dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, Dari sisi komunikasi pemasaran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota

Tasikmalaya tidak lepas dari lingkup promosi. Model komunikasi Dinas Pariwisata dan kebudayaan dalam mengkomunikasikan objek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya meliputi: 1. Promosi dalam bentuk Personal selling, yaitu berkomunikasi langsung tatap muka antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada wisatawan guna membentuk pemahaman terhadap objek wisata seperti pameran dan event, pameran biasanya diadakan pemerintah Kota Tasikmalaya maupun mengikuti pameran di daerah lain. 2. Iklan, merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan suatu objek wisata yang ada di Kota Tasikmalaya. Yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan dan melakukan kunjungan.

Sumber Daya Yang Terlibat Dalam Pengembangan Objek Wisata situ gede. Organisasi atau orang yang menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan pariwisata misalnya di tempat kerja operator (tenaga kerja) pariwisata menggunakan sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan (sumber daya fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya tarik wisatawan (sumber daya budaya), dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi wisata (sumber daya alam). Majunya suatu wisata tentu tidak lepas dari sumber daya yang sangat berkompeten di dalamnya seperti yang tercantum dalam teori Edward III. Sumber daya yang dimaksud terbagi 4 bagian yaitu staf, informasi, kewenangan dan fasilitas. Staf dalam konteks penelitian ini adalah staf dari dinas pariwisata yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata di Kota Tasikmalaya. Sarana dan prasarana yang ada di Objek wisata situ gede masih sangat minim dan rasa sadar masyarakat akan kebersihan masih kurang, jumlah pedagang yang berjualan di objek wisata situ gede berjumlah cukup banyak, dan di lakukan setiap hari, fasilitas yang di sediakan oleh dinas pariwisata pada obyek wisata berupa tempat parkir, saung tempat

makan, tempat sampah 15 unit, MCK 3 unit dan 3 unit air bersih. fasilitas ini masih tergolong sangat minim bagi masyarakat, Fasilitas yang sangat minim juga dirasakan oleh wisatawan, kesan yang diterima oleh wisatawan sangat penting guna menimbulkan rasa ingin berkunjung kembali sehingga objek wisata selalu ramai di kunjungi oleh wisatawan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penataan dan pengembangan pariwisata di Kota Tasikmalaya dalam pengembangan objek wisata di situ gede dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi dalam implementasi kebijakan pengembangan objek wisata di situ gede belum optimal, karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kurang melakukan pelaksanaan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat sehingga informasi yang didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal.
2. Sumberdaya di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan olah raga terlebih khusus di bidang pariwisata dapat di simpulkan belum optimal, kerena sumberdaya di bidang pariwisata masih kekurangan para staf yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang pariwisata.
3. Sikap Pelaksana di Dinas pariwisata dan Kebudayaan dapat disimpulkan sudah cukup baik karena para staf melaksanakan tugasnya dan patuh akan perintah kepala dinas, tetapi penetapan staf yang terjadi di bidang pariwisata masih kurang memiliki keahlian khusus di bidang pariwisata sehingga pemahaman dibidang pariwisata kurang dimiliki staf.
4. Struktur Birokrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat disimpulkan belum optimal karena belum ada SOP yang mengataur tempat-tempat wisata yang ada di Kota Tasikmalaya hanya berpedoman berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi

DAFTAR PUSTAKA

- Garna, J. K. (2000). Metode Penelitian Sosial: Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan. In *Bandung: Primako Akademika*. Primako Akademika.
- Islamy, M. I. (2002). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. PT. Bumi Aksara.
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). Manajemen Proses Kebijakan Publik. In *Jakarta: LAN Kerjasama Duta Pertiwi Foundation*. LAN Kerjasama Duta Pertiwi Foundation.
- Riant, N. D. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, penerbit PT. *Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta*.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.